

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya pemerintahan awal Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno telah membawa rakyat Indonesia pada kehidupan yang merdeka serta demokratis. Demi mewujudkan kehidupan demokratis, maka untuk pertama kali rakyat Indonesia diberi kebebasan menyalurkan hak suaranya dalam pemilihan wakil-wakil rakyat di DPR. Situasi politik dalam negeri yang dihasilkan pada pemilu 1955 membawa dampak pada polarisasi kekuatan ideologi di parlemen, yang kemudian berpengaruh terhadap rapuhnya roda pemerintahan, jatuh bangunnya perdana menteri serta tumbuhnya Demokrasi Terpimpin

Pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang merupakan puncak dari arogansi Soekarno pada akhirnya menjadi pertanda berakhirnya masa pemerintahan demokrasi. Berbagai masalah akan penegakan demokrasi menjadi pembicaraan pada saat itu, peran oposisi dan *check and balance* dihilangkan dan tumbuh suburnya kekuatan otoriter Orde Lama. Runtuhnya rejim Orde Lama dan masuknya rejim Orde Baru, pada awalnya diharapkan akan membawa angin segar dalam penegakan demokrasi di Indonesia, tetapi pada kenyataannya mengalami banyak pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).¹

¹ Ignatius Haryanto. *Kejahatan Negara*, Lembaga studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 1999. Hal, 31-105.

Kekuatan rejim Orde Baru dalam membangun kekuasaannya yang hegemonik, dalam preteknya menggunakan tiga cara antara lain:² *pertama* dukungan militer sebagai kesungguhan untuk membangun stabilitas politik yang mantap melalui peran dwi fungsi ABRI. *Kedua*, alat Birokrasi yang dijadikan untuk menarik massa dan menekan kalangan oposisi selama 32 tahun, telah berhasil membangun birokrasi pemerintahan Indonesia sebagai gurita raksasa yang sangat menakutkan (oteriter birokrasi), *ketiga*, korporatisme terhadap masyarakat dan lembaga oleh negara. Korporatisasi negara terhadap masyarakat dilakukan secara *bifrontal* dan *segmenter*. Perwakilan kelas bawah di batasi sedangkan perwakilan kepentingan kelas dominan diperbolehkan. Dalam penerapan strategis di atas pemerintahan orde baru berhasil melumpuhkan kehidupan demokratisasi masyarakat kelas bawah dan menengah.

Kepemimpinan masa orde baru selama 32 tahun berkuasa telah menimbulkan tiga hal yang sangat *paradoks* dalam pengembangan wacana *civil society* dan Demokratisasi. *Pertama*, di tengah gencarnya media massa yang begitu tumbuh di mana-mana. Akan tetapi peran media massa sangat minim dalam pengembangan wacana informasi dan *civil society* di Indonesia. *Kedua*, pertumbuhan kelas menengah yang sangat tajam pada saat itu, bukannya bagaimana menjadi sebuah *intelektual organik* (Antonio Gramsci).³ Mereka lebih senang bergabung dengan penguasa Orba untuk menikmati kekuasaan dan segala fasilitas yang mewah. Para kelas menengah pada saat itu banyak terpolarisasi ideologi pertumbuhan (*developmentalisme*) Orde Baru, mereka lebih senang mengamini dan mengikuti

² Mohtar Masoed, *Politik Birokrasi dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, Hal, 130-132.

³ Lihat Nezar Patria and Andi Arief, Antonio Gramsci Negara dan hegomoni, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Catakan II 2003, Hal,155-164.

semua perkataan pemerintah. *Ketiga* peran LSM yang tidak mendukung dalam pemberdayaan *civil society*. Banyak dari LSM lebih mengarah pada isu-isu pembangunan yang dilakukan pemerintah dari pada akibat yang ditimbulkan dari pada *hegemoni* pembangunan tersebut.⁴

Hegemoni Orde Baru yang telah mencengkram selama 32 tahun, dengan berbagai caranya telah masuk ke segala aspek kehidupan masyarakat dari tingkat yang terkecil (individu\keluarga) sampai desa. Kehidupan demokrasi terbungkam, segala bentuk kekerasan menjadi alat untuk mematikan kreativitas seseorang apabila pemikirannya tidak sesuai dengan pemerintah. Organisasi kemiliteran dijadikan alat pengontrol dari mulai Kodam, Koramil, Korem dan sampai dengan nama Babinsa .

Pemerintahan Soeharto yang tidak mengakui kehidupan demokrasi selama masa pemerintahannya, sehingga pada tahun 1997 tidak berhasil membendung deburan ombak ketiga (demokrasi). Gelombang demokrasi yang mulai santer terasa di seluruh dunia mulai menjadi-jadi ketika runtuhnya rejim Sosialis Uni Soviet pada akhir tahun 1990. Secara filosofi angin kencang perubahan politik terjadi ketika rezim *Sosialis* Uni Soviet runtuh, yaitu pada tahun 1989 ditandai dengan menyatuhnya Jerman Barat dan Timur, ambruknya ekonomi blok timur dan masuknya ekonomi pasar di negara-negara bekas Sosialis. Demokrasi menjadi gerakan global, baik karena gerakan ekonomi barat atau tuntutan masing-masing di dalam negeri yang dahulunya menerapkan sistem otoriter. Demokratissi menerpa negara-negara Eropa Timur, Amerika Latin, Asia, dan Afrika.

⁴ Lihat AS. Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, LP3S, Jakarta.,1999, hal, 5-7.

Maka tahun-tahun 1970, 1980 dan puncaknya 1990-an dianggap era gelombang demokrasi. Saat ini semua orang politisi, pengambil kebijakan, akademisi, budayawan dan orang awam membicarakan demokrasi dalam rangka menuju masa depan peradaban politik yang lebih manusiawi.⁵ Demam demokrasi terasa dan tersebar diseluruh dunia, sehingga demokrasi liberal telah mengalami kemenangan di dunia pada abad ini.⁶

Perubahan dan gelombang demokrasi yang di motori oleh kalangan kelas menengah (intelektual) dengan dukungan rakyat berhasil meruntuhkan kekasaan rezim Orba untuk membangun semangat perubahan kedalam tatanan pemerintahan dan masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya. Presiden Soeharto pada saat itu memberikan kursi kepresidenannya Kepada B.j Habibie masa jabatan sementara,. Roda pemerintahan Habibie yang berada pada masa transisisi berada dalam dua kubu kekuatan yang sangat dilematis. Di satu sisi elit politiknya masih merupakan kalangan orde baru yang konservatif, dan di satu sisi lain tuntutan gelombang reformasi terus berjalan untuk menghendaki perubahan.

Berbagai macam tuntutan reformasi mulai berdatangan dari masyarakat. Pemerintah di desak untuk segera melakukan perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi, ototiter ke demokrasi, penghapusan Dwi fungsi ABRI, perubahan sistem pemilu, kebebasan berekspresi, amandeman UUD 1945, pemerintahan yang bersih dari masalah KKN (korupsi, Kolusi dan Nepotisme), penegakan atau

⁵ John Markroff, *Gelombang Demokratisasi Dunia Gerakan sosial dan Perubahan Politik*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2002, Hal. ix.

⁶ Francis. Fukuyama, *The End of History and The Last Man (Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal)*, M.h. Amrullah (Terj), Qalam, Yogyakarta, 2004, Hal. 69-83.

supremasi hukum dan sipil. dan tuntutan untuk menyelenggarakan pemilu yang lebih transparan dan jujur untuk memilih anggota legislatif dan Presiden.

Di tengah waktu persiapan yang sempit akhirnya Presiden Habibie berhasil menyelenggarakan Pemilu 1999 yang lebih demokratis, hal ini di karenakan pelaksanaannya yang damai, lebih transparan dan berlangsung tanpa adanya kekerasan yang dapat merusak pelaksanaan pemilu pada hari pencoblosanya. Hasil Pemilu 1999 yang menghasilkan PDIP sebagai pemenang dalam perolehan jumlah suara dan peroleh kursi mayoritas di parlemen, maka dengan sistem presiden tidak langsung (di parlemen) saat itu tidak berhasil menjadikan Megawati menjadi presiden. Situasi yang seperti ini lah yang kemudian membawa keuntungan koalisi *poros tengah* yang notabnya adalah kalangan partai islam untuk mencalonkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi Presiden.

Kekuasaan pemerintahan di bawah Presiden Abdurrahman Wahid, telah sedikit membawa perubahan yang besar, berbagai aturan yang tidak demokratis mulai dikritisi walaupun menimbulkan pro dan kontra di masyarakat ataupun di tingkat elit politik sendiri. Namun sifat Gus Dur yang keras, *progresif*, islam moderat, dan *humanis* tetap tegar dengan pendiriannya untuk segera melakukan perubahan yang mendasar bagi keberlangsungan demokratisasi di Indonesia, misalnya adanya Amandemen UUD 1945, otonomi daerah, perjuangan hak-hak minoritas, penghapusan Departemen Penerangan, pembubaran Bakorstanas, Departemen Sosial, Penghapusan Litsus dan adanya Reposisi militer dalam politik praktis. Ide lain dari Gus Dur yang sangat kontroversial dan tidak berhasil dilaksanakan adalah tentang

pencabutan Tap MPRS XXV Tahun 1966 tentang Larangan ajaran Komunisme atau sejenisnya..

Tindakan Presiden Abdurrahman Wahid yang menghapuskan Departemen Penerangan berhasil menjadi titik awal bagi kebebasan pers yang terbuka lebar, independen dan bebas. Berbagai media massa baik bersifat elektronik maupun cetak, buku-buku dan segala bentuk alat untuk menyampaikan pendapat, kritikan, demonstrasi dan pemikiran sudah terlihat secara terang-terangan setiap hari. Berbagai lembaga pendukung *civil society* dan demokrasi mulai bermunculan bak jamur di musim hujan, lembaga-lembaga seperti LSM, kelompok penekan, kelompok kepentingan baik berasal dari dalam atau luar negeri menjadi bagian dari pemerintahan reformasi. Peran lembaga non pemerintah sebagai oposisi dari kebijakan pemerintah mulai melakukan fungsinya sebagai *artikulasi* dan *agregarat* kepentingan dari masyarakat bawah untuk melakukan kontrol terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.

Sisi lain dari Pemerintahan Gus Dur selama berkuasa (1999-2001) selain menumbuhkan benih-benih demokratis, Gus Dur juga telah memberikan wacana yang menarik bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, paling tidak selama kurang dari dua tahun menjadi presiden banyak sekali sumbangan bagi bangsa. Bahkan, proyek desakralisasi istana, supremasi sipil, deformalisasi sipil, perebutan tafsir konstitusi (konflik dengan parlemen) menjadi wacana politik yang menakjubkan di masanya.⁷

Pemerintahan Gus Dur telah membuktikan gagasan progresifnya, terutama masyarakat diminta untuk bersikap independen dan tidak bergantung pada negara.

⁷ Khamami. Zada (Ed), *Neraca Gus Dur di Panggung Kekuasaan*, Lakspedam, Jakarta, 2002, Hal, vii.

Negara tidak semestinya mengatur seluruh aktivitas seluruh warga negaranya, sehingga kebebasan masyarakat benar-benar berlangsung. Segala manuver politiknya dilakukan secara terbuka, sehingga fungsi *check and balance* berjalan dengan lancar.

Meskipun kehidupan demokrasi sudah terasa dengan indikator tidak adanya penekanan terhadap aspirasi masyarakat dan berbagai alasan yang tersebut di atas. Bentuk *infrastruktur* dan *suprastruktur* demokrasi mulai berjalan satu demi satu sebagai penunjang pelaksanaan kehidupan demokrasi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tetapi hal yang bersifat *irasional* seringkali menjadi bagian dari alam reformasi dalam pemerintahan Gus Dur. Walaupun masyarakat seringkali dan mulai sudah terbiasa hidup dalam alam demokratis, tetapi ketika aspirasi masyarakat dihadapkan kedalam elit politik (pemerintahan) untuk melakukan kritikan atau *bargaining position* menjadi sangat lemah dan bahkan tidak berpengaruh. Berbagai aspirasi masyarakat seakan diperlukan apabila dalam proses pemilihan umum saja, ketika pemilu sudah selesai habis manis sepagh dibuang mungkin ungkapan yang sesuai dengan kondisi pada waktu itu. Janji pemilu seakan hilang begitu saja dan janji untuk melakukan konsolidasi demokrasi seakan menjadi kenangan semata.

Fenomena demokratisasi pemerintahan Gus Dur agaknya berhadapan dengan kendala-kendala struktural dan kultural yang akan berpengaruh terhadap hasil akhirnya. Di satu sisi lain pemerintahan Gus Dur mencoba untuk membangun demokratisasi dalam proses pemerintahannya tetapi tidak diayak lagi dalam menjalankan pemerintahannya, Gus Dur membuat kebijakan yang kurang sejalan

dengan proses demokratisasi. Setidaknya dapat dicermati dari beberapa hal.⁸ *Pertama*, dalam mengelola negara Gus Dur cenderung seperti mengelola persoalan pribadinya. Personil pemerintahan diangkat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pribadi dan kedekatan hubungan personal (konflik menteri). *Kedua*, para pemimpin politik (terutama di parlemen atau DPR) kurang mendukung kepemimpinan Gus Dur (konflik DPR kasus Brunei dan Bulog) dan tidak ada kekuatan masyarakat yang mampu melakukan kontrol terhadap mereka. *Ketiga*, pemimpin politik pendukung Gus Dur tidak mempunyai landasan moral dan legitimasi ideologis yang kuat agar mereka dipatuhi oleh masyarakat dan birokrat. Pada saat itulah mulai dirasakan bahwa proses konsolidasi demokratisasi cenderung mengarah pada tindakan anarkis dan menyulut kekacauan sosial di berbagai daerah, sehingga proses konsolidasi demokrasi berjalan terputah-putah sampai pada akhir masa kekuasaannya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

"Faktor-faktor apa saja yang menentukan kegagalan proses konsolidasi demokrasi pasca Orde Baru pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid di Indonesia" ?.

⁸ Georg. Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisas* , Diterjemahkan oleh I Made Krisna, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2003, Hal. .Xi.

C. Kerangka Dasar Teori

1. Demokrasi

Istilah Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, *Demos* artinya rakyat dan *Kratein* artinya pemerintah. Hal ini berarti kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Pada zaman Romawi sampai abad pertengahan (abad XV) pelaksanaan sistem demokrasi mengalami kemunduran karena banyak berkembang praktek-praktek Tirani, Oligarki, dan Diktator. Namun semenjak zaman Renaissance (abad XVI-XIX), ajaran demokrasi bangkit kembali dengan pertimbangan-pertimbangan ini.

- a. Rakyat tidak senang dengan adanya praktek-praktek yang sewenang-wenang dari penguasa
- b. Rakyat menuntut persamaan hak dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.
- c. Pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep atau teori-teori demokrasi yang mengarah pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut Hans Kelsen, pada dasarnya demokrasi itu adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi, dalam perkembangan demokrasi dewasa ini dapat kita peroleh gambaran sebagai berikut:

- a. Yang melaksanakan kekuasaan negara demokrasi adalah wakil-wakil rakyat yang terpilih, di mana rakyat yakin bahwa segala kehendak dan

kepentingannya akan diperhatikan oleh wakil rakyat dalam melaksanakan kekuasaan negara.

- b. Cara melaksanakan kekuasaan negara demokrasi ialah senantiasa mengingat kehendak dan keinginan rakyat.
- c. Kekuasaan negara demokrasi yang boleh dilaksanakan mungkin untuk memperoleh hasil yang diinginkan oleh rakyat asal saja tidak menyimpang dari dasar-dasar pokok demokrasi.

Menurut Henry B. Mayo telah mencoba untuk memperinci nilai-nilai ini, dengan catatan perincian ini tidak berarti bahwa setiap masyarakat demokratis menganut nilai yang diperinci itu, bergantung pada sejarah serta budaya politik masing-masing. Dibawah ini di utarakan beberapa nilai yang dirumuskan olehnya :⁹

- a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga
- b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
- c. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
- d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.
- e. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat.
- f. Menjamin tegaknya keadilan.

Di antara banyak aliran pikiran yang dinamakan demokrasi ada dua kelompok aliran yang paling penting, yaitu Demokrasi Konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya demokrasi, tetapi pada hakekatnya mendasarkan dirinya

⁹ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, Gramedia, Jakarta, 1999, Hal 62-63

pada Komunisme. Kedua kelompok aliran demokrasi mula-mula berasal dari Eropa, tetapi sesudah Perang Dunia II nampaknya didukung oleh beberapa negara baru di Asia., India, Pakistan, Filipina, dan Indonesia mencita-citakan Demokrasi Kontitusional, sekalipun terdapat macam-macam bentuk pemerintahan maupun gaya hidup dalam negara-negara tersebut.¹⁰

Ada bermacam-macam demokrasi yang sudah menjadi bagian dari pemerintahan negar-negara di seluruh dunia. Keanekaragaman ini dapat dilihat berbagai sudut pandang:¹¹

a. Atas dasar penyalurannya kehendak rakyat

Menurut cara penyalurannya :

1) Demokrasi Langsung

Demokrasi Langsung berarti paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang.

2) Demokrasi Tidak Langsung

Demokrasi Tidak Langsung berarti paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks.

¹⁰ Ibid, hal, 51

¹¹ Budiyanto, *Dasar-dasar ilmu Tata negara untuk SMU*, Erlangga, Jakarta, 2000, Hal 39-41

Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum.

b. Atas dasar prinsip ideologi

Berdasarkan paham ini ada dua bentuk demokrasi, yakni:

1) Demokrasi Konstitusional (Demokrasi Liberal)

Demokrasi Konstitusional adalah demokrasi yang berdasarkan pada kebebasan individualisme. ciri khas Demokrasi Konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi.

Menurut M.Carter dan John Herz, suatu negara dikatakan negara demokratis apabila:

- a. Yang memerintah dalam negara tersebut adalah rakyat , dan
- b. Bentuk pemerintahannya terbatas

Bila suatu lingkungan dilindungi oleh konvensi dari campur tangan pemerintahan atau hukum, maka rejim ini di sebut Liberal.

2) Demokrasi Rakyat

Demokrasi rakyat di sebut juga Demokrasi Proletar yang berhaluan Marxisme-Komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada kepemilikan pribadi tanpa ada penindasan dan

keterpaksaan. Akan tetapi untuk mencapai masyarakat tersebut perlu dilakukan cara paksa atau kekerasan. Menurut Kranenburg demokrasi rakyat lebih mendewa-dewakan pemimpin, sementara itu menurut pandangan Prof. Miriam Budiardjo, Komunis tidak hanya menerapkan sistem politik, tetapi mencerminkan gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu. Negara merupakan alat untuk mencapai Komunisme. Kekerasan dipandang alat yang sah.

c. Atas dasar yang menjadi titik perhatiannya.

Dilihat dari titik berat "yang menjadi perhatiannya" demokrasi dapat dibedakan:

1) Demokrasi Formal (Negara-negara Liberal)

Yaitu suatu Demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai mengurangi/menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi.

2) Demokrasi Material (Negara-negara Komunis)

Yaitu Demokrasi yang di titik beratkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan.

3) Demokrasi Gabungan (Negara-negara Non Blok)

Yaitu Demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukana dari demokrasi formal dan demokrsi material.

2. Teori Transisi Demokrasi

Menurut Joko J Prihatmoko Transisi Demokrasi adalah interval waktu antara rezim otoriter menuju rezim politik demokratis, yaitu pemerintahan yang terpilih melalui pemilu yang bebas di mana pemerintahan secara *defacto* memiliki kewenangan menghasilkan kebijakan-kebijakan baru dan kekuasaan *eksekutif*, *legislatif* dan *yudikatif* secara *dejure* dihasilkan melalui sistem demokrasi baru.

Menurut Collier perspektif transisi tegasnya, cenderung melihat kejatuhan rezim otoriter dan proses politik yang mengikutinya sebagai urusan yang hanya melibatkan segelintir orang dipusat kekuasaan, di kalangan pemimpin organisasi massa di ibukota.¹² Sedangkan menurut Guillermo O'Donnell yang di maksud transisi adalah interval antara satu rezim politik dan rezim yang lain. Transisi di batasi, di satu sisi, oleh dimulainya proses perpecahan sebuah rezim otoritarian, dan di sisi lain, oleh pengesahan beberapa bentuk demokrasi, kembalinya beberapa bentuk pemerintahan otoriter, atau kemunculan suatu alternatif *revolusioner*.¹³

Peran elit sangat berhubungan dengan kondisi yang dinamakan masa transisi (*transisiisme*). Transisiisme yang di maksud dalam tulisan ini bukanlah ideologi atau paham yang di anut kalangan elit pemerintahan dan partai sehingga membuat mereka bergerak, berjuang total untuk mempertahankan status quo transisi selamanya. Melainkan kecenderungan untuk tetap memelihara dan mempertahankan situasi demokrasi dengan tujuan memperoleh keuntungan politis dan ekonomi. Karena

¹² Erick.Hiariej dan kawan-kawan (Ed), *Politik Transisi Pasca Soeharto*, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2004, Hal 5.

¹³ Guillermo O'Donnell dkk, *Transisi Menuju Demokrasi Rangkain Kemungkinan dan Ketidakpastian*, Nurul Agustina (Penj), LP3S, Jakarta, 1993, Hal, 6.

merupakan kecenderungan (*intention*) maka sebenarnya perilaku politik mereka dapat dicegah dengan tekanan-tekanan khusus dari elemen-elemen masyarakat sipil.¹⁴

Dalam masa transisi ada pertarungan elit politik demi menyelamatkan kepentingannya masing-masing. Setiap masyarakat terdapat dua kelas penduduk yaitu yang menguasai dan yang di kuasai, kelas pertama yang jumlahnya selalu lebih kecil, menjalankan fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu, sedangkan kelas dua yang jumlahnya jauh lebih besar diatur dan dikendalikan oleh yang pertama. (Gaetano Mosca).

Azas-azas umum elitisme menurut Vilfredo Pareto dan Robert Michels adalah:¹⁵

- 1) Kekuasaan politik seperti halnya barang-barang sosial lainnya di distribusikan tidak merata.
- 2) Pada hakekatnya, ada dua kelompok orang yaitu mereka yang memiliki kekuasaan politik penting yang tidak memiliki.
- 3) Secara internal elit itu bersifat homogen, bersatu dan memiliki kesadaran kelompok.
- 4) Elit itu mengatur sendiri kelangsungan hidupnya dan keanggotannya berasal dari lapisan masyarakat yang sangat terbatas.
- 5) Karena keempat hal di atas, maka elit itu bersifat otonom, kebal akan gugatan dari siapa pun di luar kelompoknya. Semua persoalan politik penting di selesaikan menurut kepentingan/tindakan mereka sendiri.

¹⁴ Joko Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, LP2I, Semarang, Hal 17

¹⁵ Mashuri, Maschab, *Handout Analisa kekuatan politik Indonesia*, Ilmu pemerintahan, UMY Yogyakarta, 2005.

Ada lima hal elit mempertahankan kekuasaannya (Mosca):¹⁶

- 1) Mencoba untuk dekat masyarakat
- 2) Menggunakan formula politik (ideologi) untuk kepentingan kemajuan masyarakat, tetapi pada hakekatnya sangat merugikan masyarakat
- 3) Sirkulasi elit, hanya dilakukan oleh orang-orang kepercayaan\mempunyai tujuan yang sama (satu golongan).
- 4) Manajemen Konflik. Bukan meredakan konflik malahan merupakan bom waktu
- 5) Dukungan militer, untuk membantu mempertahankan kekuasaannya.

Transisiisme itu berkembang sedemikian rupa dalam empat-lima tahun terakhir. tujuan penganut transisiisme sebenarnya dapat diduga bahwa elit ingin mempertahankan *privelese*, kekuasaan, dan keuntungan secara politis, ekonomi dan budaya dari situasi yang penuh ketidakpastian (*uncertertainly*). Modus Operandi yang dilakukan sangat variatif, dari yang bersifat *parlementeris* sampai *ektraparlementer*, dari yang berhubungan langsung dengan kewenangannya sampai tidak berhubungan langsung.¹⁷

Transisi dari pemerintahan demokratis menuju pemerintahan demokratis merupakan sebuah proses yang kompleks dan melibatkan sejumlah tahapan, menurut *Dankwart Rustow*, model tersebut mempunyai satu latar belakang, persatuan nasional, yang harus dipahami terlebih dahulu ebelum menuju transisi menuju demokrasi, menurutnya, Persatuan nasional secara sederhana memperlihatkan bahwa

¹⁶ Ibid...

¹⁷ *Joko, Op.cit*, Hal.17.

sebagian penduduk dalam dari warga negara tidak mempunyai mempunyai keraguan atau keberatan mental mengenai komunitas politiknya.¹⁸

Dengan persatuan nasional sebagai satu-satunya kondisi latar belakang, tahap pertama dalam transisi menuju demokrasi adalah tahapan persiapan (*Preparatory phase*). Tahapan ini yang bercirikan perjuangan politik untuk menjatuhkan rezim non-demokratis, tahapan kedua, tahapan keputusan, di mana elemen yang jelas dari tertib demokratis telah dibangun, dan tahapan konsolidasi, di mana demokrasi baru lebih berkembang, dan akhirnya, praktek-praktek demokrasi menjadi bagian dari budaya politik.¹⁹

Dalam transisi yang di dominasi oleh elit yang juga berada di belakang rezim otoriter yang lama, transisi jenis ini, menurut Terry Lynn Karl mengatakan, di sini pemerintahan tradisional masih memegang kendali, bahkan ketika ditekan dari bawah, dan berhasil menggunakan strategi baik berupa kompromi maupun kekerasan atau campuran keduanya untuk merebut kembali paling tidak sebagian dari kekuasaannya, di mana Karl mengambil contoh di Amerika Latin.²⁰

Ada dua dimensi pokok Proses demokratisasi telah diketahui, yaitu liberalisasi (atau kompetisi) dan *inklusifitas* (partisipasi). Berdasarkan studi komparasi mengenai transisi di Amerika Latin dan Eropa bagian selatan oleh O'Donnell dan Schmitter, permulaan tipikal dari transisi demokrasi adalah periode *liberalisasi*. Dalam periode ini, penguasa otoriter yang berkuasa memperluas ukuran-ukuran hak politik dan sipil

¹⁸ George, *Op. cit.* Hal 72.

¹⁹ *Ibid.*..., Hal 81.

²⁰ *Ibid* ..., Hal 79.

bagi perorangan maupun kelompok. Ruang oposisi diciptakan walaupun dalam kerangka masih dikontrol oleh rezim otoriter.²¹

Proses *liberalisasi* politik dan *demokratisasi*, proses tersebut mengambil tiga bentuk, yakni secara *gradual* yang terjadi jika kelangsungan *liberalisasi* dahulu kemudian berlanjut ke demokratisasi, secara simultan karena berlangsung secara bersama-sama sekaligus, atau secara "pelan cepat" dalam arti transisi berlangsung tanpa tahap demokratisasi sama sekali.²² Proses transisi demokrasi tidak selalu berakhir dengan konsolidasi demokrasi. Bisa saja transisi demokrasi berlangsung tetapi hanya pada tingkat liberalisasi politik tanpa di ikuti fase demokrasi yang bermuara pada suatu konsolidasi.²³

3. Konsolidasi Demokrasi

Juan J. Linz dan Alfred Stepan mengkonotasikan bahwa demokrasi terkonsolidasi adalah suatu rezim politik yang di dalamnya demokrasi yang sebagai suatu sistem yang kompleks dari institusi-institusi, aturan-aturan, dan dorongan-dorongan penghalang yang terpola telah menjadi (the only game in town).

Lebih jauh Juan J. Linz dan Alfred Stephan mengajukan suatu definis kerja yang jelas dari segi perilaku, sikap, konstitus, antara lain:²⁴ Dari segi perilaku, rezim demokratis dalam sebuah negara terkonsolidasi jika tidak ada tokoh-tokoh nasional, sosial ekonomi, politik (atau *Institusional*) utama yang menggunakan sumber-sumber

²¹ Ibid ..., Hal 75.

²² Joko. Prihatmoko, Op.cit, Hal 13 mengutip dari O' Donell dan Phillipe C, Transisi Menuju Demokrasi.

²³ Ibid....., Hal, 16.

²⁴ Joko, *Opcit*, Hal, 5.

penting dalam mencapai tujuan mereka dengan menciptakan rezim non demokratis atau dengan memisahkan diri pada negara.

Dari segi sikap, rezim dikatakan terkonsolidasi jika mayoritas opini publik, bahkan di tengah permasalahan ekonomi yang berat dan ketidakpuasan yang mendalam terhadap pihak yang berwenang, tetapi berpegang pada keyakinan bahwa prosedur-prosedur dan institusi-institusi demokrasi merupakan cara yang paling tepat mengatur kehidupan kolektif, dan jika dukungan bagi alternatif-alternatif anti sistem sangat kecil atau kurang lebih terisolasi dari kekuatan-kekuatan prodemokrasi.

Dari segi konstitusi, rezim demokrasi terkonsolidasi adalah kekuatan-kekuatan pemerintah dan non pemerintah sama-sama tunduk pada dan terbiasa dengan – upaya pemecahan konflik di dalam batas-batas undang-undang, prosedur dan institusi tertentu yang ditetapkan melalui proses yang demokratis.

Berkaitan dengan proses konsolidasi demokrasi, Juan J. Linz dan Alfred Stepan (1986) memastikan lima syarat demokrasi yang terkonsolidasi, yang layak menjadi agenda pendidikan politik untuk demokrasi. kelima syarat inilah yang merupakan *urgensi* pendidikan demokrasi saat ini. Adapun kelima syarat tersebut mencakup:²⁵

- 1) Harus diciptakan kondisi bagi berkembangnya masyarakat sipil yang bebas aktif.

Mereka mendefinisikan masyarakat sipil sebagai ruang politik tempat kelompok-kelompok, gerakan-gerakan, dan upaya individual di organisasikan dan relatif otonom berusaha menyuarakan nilai-nilai, mendirikan perkumpulan

²⁵ Ibid..., Hal, 188-191

dan mengalang solidaritas serta memperjuangkan kepentingan mereka. masyarakat sipil mencakup berbagai gerakan sosial (keleompok wanita, RT, keagamaan dan intelektual, serta perkumpulan dari berbagai strata sosial (serikat dagang, organisasi profesi, dan kelompok usaha).

2) Harus ada masyarakat politik yang relatif otonom.

Masyarakat politik adalah sebagai arena tempat tokoh-tokoh politik bersaing mendapatkan hak yang sah untuk menjalankan kontrol atas kekuasaan publik dan aparat negara. antara masyarakat sipil saling melengkapi dan bukan saling meniadakan. masyarakat sipil memegang sangat vital dalam konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi menuntut semua warga negara mengembangkan penghargaan terhadap institusi-institusi pokok masyarakat politik yang demokratis (parpol, legislatif, pemilu, dan aturan pemilu, kepemimpinan politik, dan aliansi antar partai politik). Masyarakat politik pada akhirnya menjembatani atau melakukan *intermediasi* antara negara dengan masyarakat politik.

3) Pemerintahan berdasarkan hukum

Konsolidasi demokrasi membutuhkan negara hukum. Konstitusionalisme dan aturan hukum menentukan jabatan-jabatan yang perlu melalui pemilu, prosedur-prosedur untuk memilih para pemegang jabatan, dan definisi bagi kekuasaan mereka agar masyarakat bersedia berperan serta di dalam dan menerima hasil dari permainan politik.

4) Harus ada birokrasi yang di manfaatkan oleh pemerintahan demokratis yang baru.

Ketiga hal di atas akan terwujud dengan baik jika ada birokrasi yang dapat di manfaatkan para pemimpin demokratis dan masyarakat ekonomi yang terlembaga. Dan birokrasi tidak bermain-main dalam politik, membangun terciptanya demokrasi yang terkonsolidasi. Syarat ini menjadi Fakultatif karena birokrasi umumnya menjadi tunduk pada pemerintah.

5) Harus ada masyarakat ekonomi yang di lembagakan.

Masyarakat ekonomi menjembatani kepentingan antara negara dan pasar. Ia menjadi syarat pendukung penting bagi konsolidasi demokrasi karena ekonomi tidak adapt dijalankan dengan komando dan tidak pernah negara demokrasi yang terkonsolidasi menerapkan ekonomi pasar murni. Dengan demikian campur tangan negara dalam pasar di perlukan, dengan alasan (1) ekonomi pasar murni tidak akan hidup tanpa peraturan negara; (2) pasar seringkali mengalami kegagalan-kegagalan dan harus dikoreksi jika hendak di fungsikan kembali; (3) demokrasi menuntut persaingan publik yang bebas menyangkut prioritas kebijakan pemerintah.

Alfred Stepan mengatakan bahwa demokrasi yang terkonsolidasi dapat di artikan sebagai rezim politik di mana demokrasi berlaku sebagai kompleksitas dari sistem kelembagaan, aturan-aturan, dan pola pemberian insentif dan disinsentif, sehingga menjadi satu-satunya aturan permainan dalam kehidupan bersama.

Menurut Georg Sorensen, ada kondisi yang mungkin terjadi dalam proses perubahan menuju demokrasi adalah proses demokrasi lemah serta demokrasi tidak solid (*frozen democracy*), dengan indikator-indikatornya meliputi (1) Sempoyongnya ekonomi baik pada tingkat nasional maupun internasional, (2) Mandegnya proses

pembentukan *civil society* dan pemerintah gagal dalam menciptakan tata tertib untuk mendorong terciptanya iklim kondusif bagi kelangsungan proses demokratisasi, (3) Bila proses konsolidasi, yakni praktek-praktek demokrasi tidak berkembang dan tidak menjadi bagian budaya politik atau konsolidasi cenderung semu, (4) Penyelesaian masalah-masalah sosial-politik-hukum yang tidak pernah tuntas yang di wariskan oleh rezim-rezim pendahulu seperti KKN, pelanggaran HAM, kekejaman aparat birokrasi dan militer, penegakan hukum, dan lainnya.²⁶

Robert A. Dahl mencatat lima kondisi yang dianggap paling mendukung pembangunan poliarki yang stabil yaitu, pemerintahan demokratis yang stabil. Kondisi-kondisi tersebut adalah 1) Para pemimpin tidak menggunakan instrumen utama koersi kekerasan, yaitu polisi dan militer, untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan, 2) Terdapat organisasi masyarakat *pluralis* yang modern dan dinamis, 3) Potensi konflik dalam *pluralisme subkultural* di pertahankan pada level yang masih dapat di toleransi, 4) Di antara penduduk negeri, khususnya lapisan politik aktifnya, terdapat budaya politik dan sistem keyakinan yang mendukung ide demokrasi dan lembaga poliarki, 5) Dampak dan pengaruh atau kontrol oleh negara asing dapat menghambat atau mendukung secara positif.²⁷

4. Kekerasan

Kebanyakan orang mengagangap kekerasan hanya dalam konteks yang sempit, yakni seperti perang, pembunuhan atau kekacauan, padahal kekerasan itu

²⁶ Georg. Sorensen, *Op.cit.*, Hal, Xiii.

²⁷ *Ibid.*....., Hal 94.

bentuknya bermacam-macam. Klasifikasi atas kekerasan yang analitis, tidak parsial dan teliti harus memenuhi dua kriteria, yaitu objektif dan lengkap.²⁸

Ada empat jenis kekerasan yang pokok yang memenuhi dua kriteria di atas, yakni kekerasan langsung (*direct violence*), kekerasan tidak langsung (*indirect violence*), kekerasan represif (*repressive violence*), dan kekerasan alienatif (*alienating violence*). Antara lain:²⁹

1) Kekerasan Langsung

Kekerasan langsung mengacu pada tindakan yang menyerang fisik atau psikologis seseorang secara langsung. Yang termasuk dalam tindakan ini adalah semua bentuk pembunuhan (*homicide*), seperti pembunuhan etnis, dan lain-lain. Semua tindakan tersebut mengganggu hak-hak asasi manusia yang paling mendasar, yakni hak hidup.

2) Kekerasan Tidak Langsung

Tindakan yang membahayakan manusia, bahkan kadang-kadang sampai membunuh, namun tidak melibatkan hubungan langsung antara korban dan pihak (orang, masyarakat atau institusi) yang bertanggung jawab atas tindakan kekerasan tersebut. Di sini terdapat dua sub kategori yang perlu di bedakan, yakni kekerasan karena kelalalian (*violence by mission*) dan kekerasan perantara (*mediated violence*).³⁰

²⁸ Objektifitas menuntut sebuah definisi yang bebas nilai, lepas dari pengaruh budaya dan politik dari rezim yang berkuasa, serta terlepas dari kodifikasi system yang ada. Sedangkan klasifikasi lengkap mensyaratkan definisi yang sistematis terhadap seluruh bentuk kekerasman yang dapat menimpa manusia. (Jamil salmi, Kekerasan dan kapitalisme, Agung Prihatmoko (Penerjemah), pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003. Hal, 29-30.

²⁹ Ibid .Hal 31-40.

³⁰ Kekerasan karena kelalalian digambarkan dengan keadaan bahaya dan tidak ada orang yang menolongnya, seperti kekerasan Amerika terhadap warga palestina yang dibantai tentara Israel. Sedangkan kekerasan perantara adalah hasil dari intervensi manusia secara sengaja terhadap

3) Kekerasan Refresif

Kekerasan referesif yakni kekerasan yang di legalkan atau tidak di kenakan sanksi atas pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, berbeda dengan jenis kekerasan lainnya karena umumnya dilakukan oleh pemerintahan. Pemerintah melakukannya dengan praktek hukum, yang mengganggu hak-hak sipil dan politik yang paling fundamental, atau yang secara sengaja mengaturnya dalam konstitusi negara. kekerasan refresif berkaitan dengan pencabutan dengan hak-hak dasar selain hak untuk hidup dan hak untuk dilindungi dari kecelakaan. Kekerasan referesif terkait dengan tiga hak dasar, yaitu hak sipil, hak politik dan hak sosial.

4) Kekerasan Alienatif

Kekerasan yang merujuk pada pencabutan hak-hak individu yang lebih tinggi, misalnya hak perkembangan emosional, budaya intelektual. Biasanya terkait dengan model kerja ekonomi kapitalis. Konsep kekerasan seperti ini memiliki dua makna, *subjektif* dan *objektif*. Dalam kekerasan alienatif yang subjektif, alienasi secara esensial memiliki makna psikologis dan mengacu pada situasi di mana individu merasa asing dengan dirinya sendiri, kebudayaan dan komunitasnya. Dalam kasus yang kedua *alienasi* merupakan sebuah fenomena sosial di mana seorang individu tercabut haknya untuk menentukan nasibnya sendiri.

lingkungan alam atau sosial yang membawa pengaruh secara tidak langsung pada manusia lain. Pengaruh ini tidak dirasakan segera namun datang melalui faktor perantara. hubungan antara institusi yang bertanggung jawab atas tindak kekerasan ini dan korbanya tidak langsung.

Dalam memahami masalah kekerasan politik kita dapat menggunakan pendekatan 3 tipologi kekerasan politik yakni atas ideologi, primordial, dan isu sosial politik. Dalam pendekatan seperti ini kekerasan politik dipahami sebagai bagian tingkah laku perseorangan ataupun sekelompok orang bersama-sama. Asumsinya persepsi ideologi dan primordial ataupun isu sosial ekonomi individual atas kondisi yang tidak adil yang sudah dirasa sudah menghadapi jalan buntu. Untuk mendapatkan penyelesaian menyebabkan seseorang kecewa berat sehingga siap untuk melakukan kekerasan.³¹

Dari sudut hasil akhir, kekerasan politik memang bermuka dua. Karenanya kekerasan politik tidak memberikan hasil yang sama bagi penguasaannya. Bagi pemerintahan otoriter, kekerasan digunakan untuk mempertahankan kekuasaannya. Bagi kaum oposisi (radikal), kekerasan digunakan untuk menjatuhkan kekuasaan otoriter tersebut. Untuk pertama, jelas bahwa kekerasan politik digunakan untuk menghalangi kemunculan pemerintahan demokratis. Untuk yang kedua, dengan digunakan kekerasan itu demokrasi telah mereka bunuh sejak kelahirannya.³²

Bagi Huntington, sejarah membuktikan bahwa kekerasan politik tidak akan menghasilkan pemerintahan demokratis. Sejak 1860-1960, sembilan dari sebelas gagal mewujudkan pemerintahan yang demokratis karena berkembangnya *civil violence* selama dua puluh tahun sebelum proses demokrasi itu berlangsung. Dalam demokratisasi gelombang ketiga (1974-1990), Nicaragua, Yaman, Ethiopia, Iran, Haiti, Rumania, dan sebagainya, mengalami kekerasan politik ketika menggulingkan

³¹ Achmad Taufik, Skripsi "Kekerasan Massa PDI-P dalam Pemilu 1999 (Studi Kasus di Daerah Yogyakarta)", Ilmu Pemerintahan, UMY, Yogyakarta, 2002. Hal, 18.

³² Bahtiar effendy, *Teologi Baru Politik Islam Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*, Galang Press, Yogyakarta, 2001, Hal, 223.

pemerintahan otoriter. Dengan pengecualian Rumania, itu pun masih dapat diperdebatkan di pemerintahan di negara-negara demokratis.³³

Terhambatnya demokrasi sebagai bangunan dasar dalam kehidupan sesama manusia adalah hakekat yang paling mendalam dan menyeluruh dari kekerasan politik. Kekerasan politik bukan saja melumpuhkan kenyataan aspek demokrasi mulai tatanan struktur dan nilai (kultur) sampai kepada proses interaksi dan hasil (kebijakan dan keputusan). Akan tetapi secara lebih jauh kekerasan politik berimplikasi langsung kepada pengabdian akan harkat dan integrasi manusia sebagaimana yang di wakili oleh hak-haknya. Kekerasan politik sekaligus melemahkan unsur-unsur demokrasi dan kemanusiaan. Kekerasan politik secara tidak langsung menekan, melecehkan dan bahkan meniadakan hak-hak politik yaitu hak berpendapat, hak pilih (dipilih dan memilih) hak hak berpendapat yakni berbeda, hak menyatakan, dan membentuk pendapat umum.³⁴

Rendahnya tingkat kekerasan politik ini di sebabakan oleh tiga hal.³⁵ *Pertama*, sejumlah negara yang mengalami transisi ke demokrasi pernah mengalami *civil violence* secara cukup substansial. Sehingga kenyataan ini menyadarkan mereka bahwa kekerasan politik sedapat mungkin harus dihindari. *Kedua*, Proses Transisi atau perubahan. Ini bergantung pada seberapa banyak kekuatan reformis yang ada di tubuh pemerintah. *Ketiga*, variasi yang ada pada kalangan pemerintahan untuk melakukan kekerasan terhadap kelompok oposisi. Sejalan itu, variasi yang ada pada angkatan bersenjata untuk mematuhi perintah penggunaan senjata. *Keempat*, adanya

³³ Ibid, Hal 223, Mengutip dari Samuel p. Huntington, *The Third wave: Democratization in the late Twentieth Century*.

³⁴ Achmad Taufik, Op.cit, Hal.19-20.

³⁵ Bahtiar effendi, Op. cit, Hal, 221-222.

variasi pada tubuh oposisi dalam hal menggunakan kekerasan. Artinya, tidak semua oposisi bersedia menggunakan kekerasan dalam memperjuangkan aspirasi politik mereka.

5. Fundamentalisme

Gerakan fundamentalisme seringkali dalam aksinya menggunakan aksi kekerasan tetapi tidak semua kekerasan bersifat fundamentalis dan tidak semua fundamentalis berarti kekerasan. Pada umumnya gerakan Fundamentalisme baik itu dari agama atau bukan muncul sebagai akibat atas kegagalan modernisme di dalam menata dunia menjadi lebih baik. Ternyata di samping sejumlah kebijakan yang di sajikan, justru lebih banyak mudarat atau ketimpangan yang muncul, terutama bagi mereka yang tidak dapat mengikuti iramanya.³⁶ Sehingga bagi dirinya merasa tersingkirkan dan sulit untuk memperjuangkan nasib golongan mereka sendiri dalam kehidupan yang lebih kompleks.

Ada lima aspek yang kira-kira secara implisit akan merupakan upaya yang untuk membuat definisi tentang fundamentalisme. hal ini berlaku bukan saja pada agama Kristen saja tetapi agama-agama lain.³⁷

- 1) Posisi Teologis yang menjadi Gerakan Fundamentalisme. Teologi ini memiliki kesadaran bahwa kebenaran itu sebenarnya secara penuh hanya di miliki oleh komunitas tertentu.
- 2) Aspek yang bersifat misiologis, mereka sangat *agresif* dan *ekspansif* untuk langkah-langkah mempertobatkan orang, dan memasukkan orang lain

³⁶ Wiwin siti aminah (Ed), *Memahami Wajah Para Pembela Tuhan, Interfidei*, Yogyakarta, 2003, Hal XIV.

³⁷ Ibid, Hal 121-127.

ke dalam agamanya \ komunitasnya. Pandangan ini di Indonesia sangat berbahaya , karena dapat memicu hubungan-hubungan sosial.

- 3) Hirarki Institusional, karena gerakan-gerakan ini selalu mempunyai struktur\ hirarki, dan institusinya jelas akan menjadi pusat pengendali dan penentu.
- 4) Bersifat kultural-intelektual, bahwa invaliditas dari firman tuhan itu memang merupakan taruhannya, biasanya kaum fundamentalis mengartikan kitab sucinya secara harfiah tidak kontekstual .
- 5) Fundamentalisme yang mempunyai kemampuan berkomunikasi atau berinteraksi dengan kelompok-kelompok lain. kaum fundamentalisme lebih cenderung bersifat *eksklusif, komunalistik, sektarian*, dan cenderung radikal.

Identifikasi sebuah gerakan di sebut fundamentalisme antara lain,³⁸

- 1) Pada umumnya fundamentalisme berangkat dari klaim bahwa sumber-sumber gagasan mereka, yang umumnya berupa teks, adalah sumber yang lengkap dan tanpa kesalahan, mereka menganggap bahwa golongan yang paling benar.
- 2) Bersamaan dengan keyakinan akan teks yang sempurna itu, kaum fundamentalis juga mengklaim adanya pengejawantahan sosial yang sempurna ajaran di masa lampau.
- 3) Fundamentalisme lahir dari budaya-budaya tradisional, tetapi kita tidak dapat sepenuhnya mengidentifikasikan mereka sebagai kaum tradisional

³⁸ Steve Bruce, *Fundamentalisme Pertautan Sikap Keberagaman dan Modernitas*, Erlangga, Jakarta, 2000, Hal.18-21.

dalam pengertian sederhana. Bagi kaum fundamentalis, sejarah keagamaan masa lampau harus dilestarikan sebagai sumber rujukan dan perlambangan bagi mereka yang ingin menegakkan kembali kejayaan islam.

- 4) Ciri lain yang dapat ditemukan kaum fundamentalis ialah sebagaimana gerakan-gerakan yang lain, mereka menarik perhatian orang-orang dalam strata sosial tertentu lebih dari yang lainnya.
- 5) Kelompok-kelompok kaum fundamentalis seringkali mengkombinasikannya komitmen untuk mengembalikan kejayaan masa lampau secara selektif dengan penggunaan fasilitas teknologi modern demi tercapainya tujuannya.

Ada dua hal penting dalam Islam untuk memahami fundamentalisme dalam agama tersebut. *Pertama*, tidak adanya batasan yang jelas antara aspek spiritual dan kekuasaan keagamaan. tidak seperti Kristianitas, Islam mencapai puncak kekuasaan politiknya pada saat Nabi Muhammad masih hidup. Karena itu komunitas kharismatik yang asli tersebut tidak harus memosisikan diri secara terpisah, atau bertentangan, dengan kekuatan sekuler. Dengan demikian tidak ada perbedaan yang jelas antara agama dan negara. *Kedua*, terpusatnya hukum. Alquran dan Hadist yang merupakan gabungan antara keyakinan dan tuntutan moral; keduanya merupakan doktrin hukum.³⁹

Untuk memperlemah kaum fundamentalisme dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain;

³⁹ Ibid, Hal.58.

1. Fundamentalisme dilemahkan oleh perpecahan umat Islam sendiri
2. Hambatan dan sekaligus faktor yang menjadi lemahnya gerakan fundamentalisme ialah keluwesan negara.
3. Bentuk lainnya dalam bagaimana negara bangsa memperlemah fundamentalisme adalah bahwa negara-negara Islam bersaing demi kepentingan regional mereka dengan cara mendukung satu kelompok radikal untuk berseteru dengan kelompok lainnya. Fundamentalisme juga dilemahkan oleh dinamika internal mereka sendiri. Keyakinan bahwa fundamentalisme terutama harus digerakkan dari dalam sebuah negara telah menciptakan persoalan konsistensi dalam fundamentalisme islam

D. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembahasan, pengertian antara konsep yang satu dengan konsep yang lain. Sedangkan menurut Koentjoroningrat konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.

Adapun definisi konsepsional dari kerangka dasar teori di atas antara lain:

1. Demokrasi adalah suatu sistem politik, ekonomi dan sosial yang menghargai hak asasi manusia dan mengutamakan prinsip anti kekerasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Transisi Demokrasi adalah waktu jarak yang menunjuk pada peralihan kekuasaan dari pemerintahan otoriter menuju demokratis dengan proses pergantian kekuasaan yang demokratis.
3. Konsolidasi Demokrasi adalah suatu tujuan perjalanan pemerintahan transisi, di mana terbentuknya infra struktur dan supra demokrasi yang solid untuk membangun adanya *civil society*.
4. Kekerasan adalah suatu tindakan yang berpengaruh atau berdampak terhadap terganggunya hak orang lain baik secara fisik atau psikologis, dan berdampak langsung ataupun tidak langsung
5. Fundamentalisme adalah suatu gerakan yang dilakukan baik oleh kelompok atau perorangan yang tidak menerima perubahan yang sedang terjadi sehingga mengakibatkan lingkungannya terbatas, dan mempunyai kepercayaan yang sangat berlebihan terhadap suatu keyakinanya.

E. Definisi Operasional

Defenisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur variabel, atau dengan kata lain semacam petunjuk bagaimana mengukur satu variabel-variabel.⁴⁰

Faktor-faktor yang mempengaruhi konsolidai demokrasi pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) antara lain:

1. Konflik elit :

- a. Gus Dur dengan Kabinet

⁴⁰ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survai*, LP3ES, Jakarta, 1989, Hal. 46

- b. Gus Dur dengan DPR
- 2. Krisis ekonomi
- 3. kekerasan di berbagai daerah :
 - a. Kekerasan dalam masyarakat dan fundamentalisme
 - b. Gejolak seperatisme.

F Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang utama dalam melakukan penelitian, metode penelitian memandu penulis tentang unsur bagaimana penelitian dilakukan.

Penelitian Deskriptif di bagi menjadi tiga bagian:⁴¹

- a) Penelitian Eksplorasi, yakni jenis penelitian yang bertujuan untuk mengali data/fakta yang belum diketahui, langsung ke lapangan.

Adapun ciri-ciri metode deskriptif adalah:

- 1) Sifat terbuka dan masih mencari-cari
 - 2) Belum mempunyai Hipotesa
 - 3) Berusaha menjelaskan fenomena (gejala sosial)
- b) Penelitian penjelasan (*Eksplanatory/Confirmatory*)

Yaitu penelitian yang berusaha mencari penjelasan/menyoroti hubungan antar berbagai variabel peneliti (dependen dan indenpenden variabel).

⁴¹ Juhari. Sasmita, *Handout scope penelitian ilmu politik*, Ilmu pemerintahan, Yogyakarta, Umy, 2005.

Adapun ciri-cirinya antara lain:

- 1) Berusaha menguji hipotesa (dugaan) yang telah dirumuskan
 - 2) Titik berat pada penjelasan hubungan antar variabel
 - 3) *Testing reseach*
 - 4) Penelitian *verifikasi*
- c) Penelitian *Deskriptif* (penggambaran) yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dengan jelas segala fenomena sosial/politik, tanpa bersandar dari pada hipotesa yang ketat. *Deskriptif reseach* mempunyai tujuan :
- 1) Untuk mengetahui perkembangan sarana fisik dan konflik, serta terjadinya fenomena sosial
 - 2) Untuk mendeskripsikan (menggambarkan) dengan jelas dan terperinci tentang fenomena sosial politik di dalam masyarakat.

Dari beberapa jenis penelitian di atas maka, diambil untuk melakukan penelitiannya adalah dengan menggunakan jenis penelitian *Deskriptif*.

2. Unit Analisa

Untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsolidasi demokrasi pasca Orde Baru di Indonesia, hal ini membutuhkan informasi untuk mendapatkan data, maka unit analisa adalah *infra struktur* dan *supra struktur* demokrasi termasuk lembaga penyelenggara demokrasi dalam hal ini lembaga legilatif dan lainnya, sedangkan *Infrastuktur* demokrasi meliputi masyarakat dengan tingkat kualitas kesadaran, pendidikan, kebebasan pers, budaya politik yang tidak

mendukung terciptanya *civil society* untuk keberlangsungan sebuah kehidupan demokrasi yang lebih mantap dan bersifat substansial.

3. Data dan sumber data

Data adalah segala keterangan atau informasi mengenai segala keterangan atau informasi mengenai segala hal yang terkait dengan tujuan penelitian.⁴² Data yang dibutuhkan peneliti ini adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari dokumen-dokumen (data tidak langsung) melalui buku-buku, media massa, referensi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.⁴³

Dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi maka dalam mencari sumber datanya terkait dengan majalah, jurnal, koran-koran baik berita atau artikel, internet, buku-buku dan laporan yang terkait dengan pembahasan materi yang dijadikan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sumber data di atas menggunakan data sekunder, maka dalam teknik pengumpulan data ini menggunakan Studi Dokumentasi. Teknik pengumpulan data adalah mencari-cari data-data dari dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan judul, seperti buku-buku, majalah, internet dan sebagainya. Studi Dokumentasi menggunakan bahan-bahan referensi yang diperoleh melalui studi pustaka.

⁴² Handari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1987, Hal, 65.

⁴³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Grafindo, Jakarta, 1995, Hal, 84.

5. Teknik Analisa Data

Setelah melakukan semua dari jenis penelitian, sumber data, serta teknik pengumpulan data. Maka yang tepat, dalam teknik analisa data yang dipakai adalah *teknik Kualitatif*, yaitu menganalisa masalah tanpa menggunakan data statistik atau matematis serta dengan menggunakan analisa isi agar mendapat jawaban ilmiah logis dan *empirik*. penelitian dengan pendekatan *kualitatif* lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan ilmiah dan Penelitian kualitatif lebih menekankan hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah penekanannya tidak pada hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian, melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.⁴⁴

⁴⁴ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, , 1998, Hal, 5.